

Peran Komite Sekolah dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah pada Lingkup Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J. B. Sitanala Cabang Masohi Maluku Tengah 2023

Sartje Augustyn¹, Izaak Hendrik Wenno², L.J Lokollo³

¹ Universitas Pattimura, Indonesia; sartjeaugustyn98@admin.sd.belajar.id

² Universitas Pattimura, Indonesia; wennocak@gmail.com

³ Universitas Pattimura, Indonesia; lambertuslokollo@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

School Committee;
YPPK Dr. J.B. Sitanala;
School Based Management

Article history:

Received 2023-05-05

Revised 2023-06-22

Accepted 2023-07-29

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the role of the school committee in YPPK Dr. J. B. Sitanala Masohi Branch in implementing SBM, as well as analyzing what supporting and inhibiting factors were faced by the school committee within YPPK Dr. J. B. Sitanala Masohi Branch in implementing SBM. This type of research is field research, using a qualitative research approach to analyze and describe the implementation of SBM in schools within the scope of YPPK Dr. J. B. Sitanala Masohi Branch. The research took place in 5 schools under YPPK Dr. J. B. Sitanala Masohi branch, in March-May 2023. The research data was obtained using observation, interview and documentation techniques. Data analysis uses the Miles and Huberman method. Based on the results of the research, the conclusion that can be drawn is the role of the school committee in YPPK Dr. J. B. Sitanala Masohi branch in implementing SBM as an Advisory agency is on a fairly good priority scale (60%), Supporting agencies are on a good priority scale (70%), Controlling agency is on a the priority is quite good (45.71%), and the Mediator agency is on a good priority scale (73.3%). Factors inhibiting school committees in the scope of YPPK Dr. J. B. Sitanala Masohi Branch in implementing SBM, namely the quality of school committee human resources, an incorrect understanding of the role of school committees, the public's perception of free education is still wrong, the distribution of educators by the Government, as well as the socio-economic background of students' parents.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Sartje Auugustyn

Universitas Pattimura, Indonesia; sartjeaugustyn98@admin.sd.belajar.id

1. PENDAHULUAN

Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Dr. J. B. Sitanala merupakan salah satu yayasan besar di Maluku yang bergerak di bidang pendidikan. Saat ini YPPK Dr. J. B. Sitanala menaungi

400 lebih sekolah pada 32 Cabang di Maluku dan Maluku Utara, termasuk YPPK Dr. J. B. Sitanala Cabang Masohi. YPPK Dr. J. B. Sitanala Cabang Masohi menaungi 20 sekolah, dari jenjang SD hingga SMA.

Bermitra Pemerintah, sekolah Kristen di bawah naungan YPPK Dr. J. B. Sitanala tidak hanya melayani golongan masyarakat tertentu. Guru dan peserta didik berasal dari berbagai latar belakang suku dan agama. Sekolah juga diwajibkan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan Pengurus Pusat YPPK Dr. J. B. Sitanala, termasuk kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Secara politis, kebijakan MBS merupakan bentuk otonomi di bidang pendidikan, yang esensinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah (Mbuik, 2019). Artinya Pemerintah memberikan kewenangan yang lebih mandiri bagi kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan di tingkat satuan pendidikan masing-masing, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dilihat dari segi manajemen, sekolah, komite sekolah, dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien (Yasin, Aswasulasikin, Apriana, & Sururuddin, 2021). Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh Komite Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah, serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Konsep partisipasi masyarakat dan orang tua dalam bentuk komite sekolah sangat diperlukan untuk mendukung proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Nuzula, 2022). Dengan perkataan lain antara pihak sekolah, komite sekolah, dan masyarakat harus membina hubungan yang harmonis. Jika hubungan pihak sekolah, komite sekolah, dan masyarakat berjalan dengan baik, maka rasa tanggung jawab dan partisipasi dari pihak-pihak yang terkait untuk memajukan sekolah lebih tinggi.

Mengubah manajemen sentralisasi menjadi desentralisasi berbasis sekolah (transisi) merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Transisi ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian, baik sistem (struktur)-nya, kulturnya, maupun figurinya, dengan tuntutan-tuntutan baru MBS. Karena itu, kendatipun MBS telah diimplementasikan di sekolah, namun secara realita di lapangan menemui banyak kendala, termasuk pada sekolah di bawah naungan YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi.

Berdasarkan hasil kajian lapangan ditemukan permasalahan dalam implementasi MBS di sekolah, diantaranya yaitu partisipasi komite sekolah masih rendah, komite sekolah belum berperan aktif untuk ikut dalam melaksanakan program sekolah, serta lemahnya pemahaman warga sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS yang menekankan pada aspek kemandirian, kerjasama atau kemitraan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Padahal dengan mengimplementasikan MBS diharapkan mampu mewujudkan pendidikan yang bermutu melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan partisipasi warga sekolah (komite sekolah), adanya hubungan kemitraan yang kuat, dan juga terciptanya sekolah yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program sekolah.

Sejatinya keberadaan Komite Sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya manajemen sekolah yang efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila kepala sekolah mampu menggandeng Komite Sekolah dalam merencanakan, melaksanakan mengembangkan serta menilai program-program sekolah. Namun, pada kenyataannya pembentukan Komite Sekolah pada sekolah di bawah naungan YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi masih banyak hanya untuk formalitas saja. Ini disebabkan masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi dibentuknya Komite Sekolah. Padahal Komite Sekolah merupakan warga sekolah

yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Walaupun Komite Sekolah dan sekolah mempunyai kemandirian sendiri-sendiri tetapi harus menjadi mitra dan saling bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Masalah lain adalah susunan pengurus Komite Sekolah senantiasa berubah setiap beberapa tahun secara periodik dan ini berdimensi jangka pendek. Komite Sekolah merupakan wadah dan tempat menyalurkan aspirasi prakarasa oleh masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Tetapi dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap tujuan didirikannya Komite Sekolah menyebabkan peran Komite Sekolah hanya terpaku pada masalah pembangunan dan biaya pendidikan saja. Hal ini, mengakibatkan Komite Sekolah menjadi kurang respons terhadap berbagai program yang dihasilkan oleh sekolah.

Disamping itu, tidak banyak sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait MBS di Kabupaten Maluku Tengah. Bahkan banyak komponen di sekolah dalam lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi yang tidak tahu pasti bagaimana sebenarnya penerapan MBS yang benar. Departemen pendidikan memang melakukan beberapa hal sehubungan dengan ini, namun terlihat jelas, masih jauh dari cukup. Misalnya, dalam mensosialisasikan program ini, komite sekolah belum pernah diundang untuk mengikuti pelatihan. Ini membuat informasi yang diperoleh tidak merata.

Di sisi lain, kurangnya partisipasi komite dan masyarakat dalam program sekolah dalam lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi, khususnya bila berhubungan dengan pengumpulan dana juga disebabkan impresi yang salah pada masyarakat tentang dana BOS yang seolah-olah menggratiskan biaya pendidikan anak hingga jenjang SMP. Kesalahan pemahaman soal pendidikan gratis, serta tidak terlatihnya pihak sekolah dan komite, secara akumulatif membuat peran komite sekolah dalam mengimplementasikan MBS masih rendah. Penelitian terkait implementasi MBS di sekolah dalam lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi belum pernah dilakukan. Karenanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik awal kajian terhadap implementasi MBS serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat peran kepala sekolah dan komite sekolah dalam mengimplementasikan MBS di lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran komite sekolah di lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala Cabang Masohi dalam mengimplementasikan MBS, dengan tujuan khusus yaitu: mengkaji bagaimana peran komite sekolah di lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala Cabang Masohi dalam mengimplementasikan MBS, mengkaji faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi komite sekolah di lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala Cabang Masohi dalam mengimplementasikan MBS.

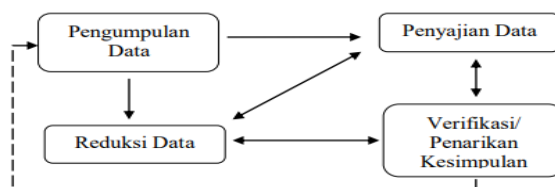
2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei langsung di lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian berlangsung di 5 sekolah dalam naungan YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi, yaitu SD Kristen Haruru, SD Kristen Masohi, SMP Kristen Haruru, SMP Kristen Masohi, dan SMA Kristen 1 Amahai pada bulan Maret-Mei 2023. Penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada beberapa hal. Subjek penelitian adalah Komite Sekolah SD Kristen Haruru, SD Kristen Masohi, SMP Kristen Haruru, SMP Kristen Masohi, dan SMA Kristen 1 Amahai. Sementara objek yang diteliti adalah peran komite sekolah dalam mengimplementasikan MBS dengan parameter sebagai Lembaga penasihat, Lembaga pendorong, Lembaga pengendali, dan Lembaga penghubung (Setiawan, Sudrajat, & Tedjawiani, 2022).

Data penelitian ini diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi adalah suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis selama 3 bulan. Instrumen yang digunakan dalam observasi ini yaitu lembar observasi, yang disusun sesuai kisi-kisi lembar observasi, sesuai dengan 4 peran komite sekolah dalam mengimplementasikan MBS. Untuk menguji keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu: (1). Menggunakan pendekatan triangulasi yaitu melakukan crosscheck secara mendalam berbagai data

yang telah dikumpulkan, baik data dari wawancara antar responden, hasil wawancara dengan observasi, serta hasil wawancara dengan kajian teori/pandangan tokoh ahli di bidang penelitian tersebut; dan (2). Pendekatan berdasarkan lamanya waktu penelitian, yaitu kurang lebih tiga bulan agar datanya lebih komprehensif.

Analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu; (1). Reduksi data (pemilihan data sesuai tema); (2). Display data (penyajian data); serta (3). Penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman disajikan dalam gambar 1.



Gambar 1. Analisis Data Model Miles dan Huberman

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat dijelaskan terkait hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti bekerja untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya tentang peran komite sekolah dalam mengimplementasikan MBS, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. *Kedua*, reduksi data (*data reduction*). Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data bukan hanya membuang data yang tidak diperlukan, melainkan merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data. Berkaitan dengan penelitian ini, setelah data-data terkumpul yakni yang berkaitan dengan masalah peran komite sekolah dalam menerapkan MBS, selanjutnya dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok permasalahan. Langkah reduksi data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah *editing*, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses pelaksanaan MBS sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola data. Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep yang sesuai dengan fokus penelitian ini. *Ketiga*, Penyajian data (*data display*). Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data menguraikan data dengan teks yang bersifat deskriptif. Tujuan penyajian data ini adalah agar peneliti makin mudah memahami apa yang diteliti, dan mempermudah penyampaiannya kepada pembaca. *Keempat*, Penarikan dan Pengujian Kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan oleh peneliti. Pada dasarnya dengan cara mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari *display* data yang telah dibuat. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, peran komite sekolah di lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi dalam Implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai Advisory agency (lembaga penasehat) berada pada skala prioritas cukup baik (60%), Supporting agency (lembaga pendorong) berada pada skala prioritas baik (70%), Controlling agency (lembaga pengendali) berada pada skala prioritas cukup baik (45,71%), dan Mediator agency (lembaga penghubung) berada pada skala prioritas baik (73,3%).

Peran Komite sebagai Lembaga Penasehat

Sebagai pemberi nasehat dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, komite sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya sekolah yang berkualitas. Gambar 2 menyajikan peran komite sekolah sebagai lembaga penasehat dengan parameter: (1) Komite sekolah memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), pada skala prioritas baik (100%). (2) Komite sekolah memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), pada skala prioritas baik (100%). (3) Komite sekolah memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kriteria pendidik, pada skala prioritas kurang baik (20%). (4) Komite sekolah memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kriteria tenaga kependidikan, pada skala prioritas kurang baik (0%). (5) Komite sekolah memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai fasilitas pendidikan, pada skala prioritas baik (80%).



Gambar 2. Skala Prioritas Peran Komite Sekolah Sebagai Lembaga Penasehat

Berikut petikan sebagian hasil wawancara dengan responden ketua komite SD Kristen Haruru, yaitu :

“Sejak adanya bantuan operasional sekolah (BOS) peranan komite sekolah dalam memberikan nasehat sudah kurang, karena sudah dibatasi oleh peraturan-peraturan pemerintah daerah, dilarang ada pungutan-pungutan, dilarang ada sumbangan-sumbangan yang sifatnya mengikat, jadi otomatis program-program yang diajukan itu berdasarkan prioritas saja, jadi apa yang dibutuhkan oleh sekolah tidak terlalu membutuhkan pertimbangan dari pihak komite sekolah” (Hasil wawancara tanggal 20 Februari 2023).

Hal senada dikatakan oleh kepala SD Kristen Haruru dan Ketua Komite SD Kristen Masohi: “Masukan yang diberikan komite sekolah terkait peningkatan mutu sekolah, seperti peningkatan mutu lulusan, penambahan fasilitas sekolah, dan partisipasi siswa dalam kegiatan bertaraf regional dan nasional. Masukan ini disampaikan secara lisan dalam forum rapat. Pada dasarnya program baru dapat dilaksanakan setelah kita putuskan dalam rapat bersama dengan guru dan kepala sekolah” (Hasil wawancara tanggal 27 April 2023).

Analisis RCA menunjukkan bahwa faktor pendukung peran komite sekolah sebagai lembaga penasehat adalah adanya kerjasama yang baik antara warga sekolah dan komite sekolah, serta dukungan pemerintah dan YPPK. Sementara faktor penghambat adalah masih ada pendidik yang belum memenuhi kriteria kualifikasi akademik, pemahaman terhadap peran Komite Sekolah yang masih kurang sehingga menganggap hal ini merupakan urusan sekolah semata, sistem rekrutmen tenaga kependidikan belum menetapkan kriteria tenaga kependidikan, serta persepsi masyarakat tentang pendidikan gratis masih keliru sehingga merasa hal ini merupakan tanggung jawab sekolah dan pemerintah semata.

Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Pendorong

Sebagai pendorong, komite sekolah harus memberikan dukungan terhadap program-program yang akan dijalankan di sekolah, serta memberikan dukungan material maupun non material dalam

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Gambar 3 menyajikan peran komite sekolah sebagai lembaga pendorong dengan parameter: (1) Komite sekolah mendorong orangtua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, pada skala prioritas baik (100%). (2) Komite sekolah menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, pada skala prioritas baik (100%). (3) Komite sekolah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi, pada skala prioritas cukup baik (60%). (4) Komite sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan/program/ penyelenggaraan dan keluaran pendidikan pada skala prioritas kurang baik (20%).

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, bahwa komite sekolah mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, serta menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Namun dalam hal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan/program/ penyelenggaraan dan keluaran pendidikan jarang dilakukan karena mereka tidak memiliki panduan monitoring dan evaluasi.



Gambar 3. Skala Prioritas Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Pendorong

Berikut petikan sebagian hasil wawancara dengan responden ketua komite SD Kristen Haruru.

“Kami dari komite sekolah memberikan apresiasi kepada sekolah dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya ketika berpartisipasi dalam kegiatan lomba siswa, atau ketika ada kegiatan kristiani, kami dari komite sekolah selalu diundang, dan memberikan sambutan. Hal ini kami gunakan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang keunggulan-keunggulan yang ada di sekolah dan memberikan informasi terhadap program-program yang dilaksanakan oleh sekolah sangat bermanfaat. Atau ketika sebelum mengikuti ujian nasional sekolah menginginkan ada doa bersama dan kami dari komite sekolah mendukung dengan menghimbau kepada orang tua untuk mendampingi anak-anaknya agar mereka benar-benar mengikuti kegiatan tersebut” (Hasil wawancara tanggal 20 Pebruari 2023).

Hal senada diberikan oleh Ketua Komite SD Kristen Masohi, yaitu: “Partisipasi orang tua dalam pendidikan sudah sangat baik, khususnya dalam pendidikan karakter. Komite sekolah juga memberikan dukungan berupa sumbangan bukan berupa iuran secara spontanitas, seperti saat penerimaan rapot kita minta sumbangan disitu yang penting jangan berupa iuran dan komite sekolah harus tahu itu dan komite selalu mendukung” (Hasil wawancara tanggal 27 April).

Analisis RCA menunjukkan bahwa terhadap faktor pendukung peran komite sekolah sebagai lembaga pendorong adalah adanya kerjasama yang baik antara warga sekolah dan komite sekolah, serta adanya partisipasi masyarakat. Sementara faktor penghambat adalah Tidak semua masyarakat memiliki komitmen dan perhatian yang besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, serta komite sekolah tidak memiliki SDM dan instrumen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan.

Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Pengendali

Gambar 4 menyajikan peran komite sekolah sebagai lembaga pengendali dengan parameter: (1) Komite sekolah mengontrol pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, pada skala prioritas

cukup baik (40%). (2) Komite sekolah mengontrol penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah, pada skala prioritas cukup baik (60%). (3) Komite sekolah mengontrol penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah, pada skala prioritas cukup baik (60%). (4) Komite sekolah mengontrol Kinerja sekolah, pada skala prioritas cukup baik (60%). (5) Komite sekolah mengontrol mutu sekolah, pada skala prioritas cukup baik (60%). (6) Komite sekolah mengontrol sumberdaya sekolah, pada skala prioritas kurang baik (20%). (7) Komite sekolah mengontrol *output* lulusan sekolah, pada skala prioritas kurang baik (20%).



Gambar 4. Skala Prioritas Peran Komite Sekolah Sebagai Lembaga Pengendali

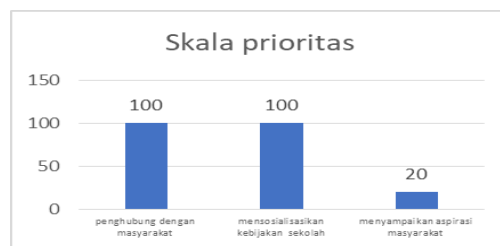
Berikut sebagian petikan hasil wawancara dengan responden ketua komite SD Kristen Masohi terkait peran komite sekolah sebagai lembaga pengendali: “Pengendalian dilakukan secara informal dengan cara berkunjung ke sekolah. Misalnya ketika kepala sekolah telah memprogramkan ujian nasional, kami siap untuk mengontrol apakah benar dana-dana yang dirancang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya. Jika sekolah memberikan pelajaran tambahan untuk siswa yang akan menempuh ujian nasional, kita lihat bagaimana keadaan pendidik apakah misalnya pendidik itu menjalankan tugasnya dengan baik, dan kalau misalnya ada laporan atau ada temuan hal ini akan ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada kepala sekolah” (Hasil wawancara tanggal 27 April 2023).

Jawaban yang berbeda diberikan oleh responden Kepala SD Kristen Haruru, SMP Kristen Haruru, dan SMP Kristen Masohi, yaitu: “Menyangkut proses pembelajaran, komite sekolah tidak terlalu memantau hanya saja biasanya komite sekolah dilibatkan apabila ada permintaan dana dari orang tua siswa” (Hasil wawancara tanggal 25 Februari 2023).

Analisis RCA menunjukkan bahwa faktor pendukung peran komite sekolah sebagai lembaga pengendali disajikan adalah adanya kerjasama yang baik antara warga sekolah dan komite sekolah. Sementara faktor penghambat adalah komite sekolah tidak memiliki SDM untuk melakukan pengendalian.

Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Penghubung (Mediator)

Komite sekolah sebagai mediator adalah penghubung antara masyarakat dan pihak sekolah, sehingga masyarakat juga dituntut untuk menjaga lingkungan sekolah dengan baik, dan pastinya proses belajar mengajar dan lainnya akan jauh lebih baik. Gambar 5 menyajikan peran komite sekolah sebagai lembaga penghubung dengan parameter: (1) Komite sekolah menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah, pada skala prioritas baik (100%). (2) Komite sekolah membantu sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan sekolah, pada skala baik (100%). (3) Komite sekolah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam usulan membuat kebijakan, dan sebagainya, pada skala prioritas kurang baik (20%).



Gambar 3. Skala Prioritas Peran Komite Sekolah Sebagai Lembaga Penghubung

Sebagai penghubung antara masyarakat dan sekolah, komite sekolah berperan dalam menjembatani komunikasi antara sekolah dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mendukung kebijakan pendidikan di sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanannya. Berikut sebagian petikan hasil wawancara dengan responden Kepala SMAK 1 Amahai terkait peran komite sekolah sebagai lembaga penghubung: “Menurut saya, hubungan sekolah dengan masyarakat saat ini sangat harmonis. Kami tidak dihambat ketika melakukan kegiatan pendidikan. Kami juga terlibat aktif dalam kegiatan Negeri, jika diminta. Kalau ada program Negeri yang melibatkan pendidikan, kami selalu dilibatkan. Hal ini tidak lepas dari peran komite sekolah sebagai jembatan antara kami dan masyarakat” (Hasil wawancara tanggal 8 Maret 2023).

Jawaban senada diberikan oleh responden Kepala SD Kristen Haruru, yaitu: “Menurut saya, komite sekolah telah berperan sangat baik sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, karena sampai saat ini kami tidak memiliki konflik dengan masyarakat. Dapat dikatakan hubungan kami seperti simbiosis mutualisme. Mereka membantu kami ketika kami butuhkan, dan kami selalu terlibat dalam kegiatan masyarakat dan negeri jika diminta. Saya rasa, sekali lagi ini berkaitan dengan posisi komite sekolah sebagai tokoh masyarakat sehingga ada kedekatan emosional yang memudahkan pendekatan persuasif antara komite sekolah dengan masyarakat” (Hasil wawancara tanggal 25 Februari 2023).

Analisis RCA menunjukkan bahwa faktor pendukung peran komite sekolah sebagai lembaga penghubung adalah adanya kerjasama yang baik antara warga sekolah dan komite sekolah, dan adanya partisipasi masyarakat. Sementara faktor penghambat adalah masyarakat belum pernah memberikan aspirasi kepada sekolah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, maka secara deskriptif terungkap bahwa peran komite sekolah dalam implementasi MBS di sekolah-sekolah dalam naungan YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi yaitu sebagai Advisory agency (lembaga penasehat), Supporting agency (lembaga pendorong), Controlling agency (lembaga pengendali), dan Mediator agency (lembaga penghubung). Hasil observasi menunjukkan peran komite sekolah dalam naungan YPPK Dr. J.B. Sitanala cabang Masohi sebagai Advisory agency (lembaga penasehat) berada pada skala prioritas cukup baik (60%), Supporting agency (lembaga pendorong) berada pada skala prioritas baik (70%), Controlling agency (lembaga pengendali) berada pada skala prioritas cukup baik (45,71%), dan Mediator agency (lembaga penghubung) berada pada skala prioritas baik (73,3%).

Peran Komite sebagai Lembaga Penasehat

Sebagai pemberi nasehat secara umum komite sekolah adalah sebagai mitra yang sangat berpengaruh kedudukannya dalam pengelolaan pendidikan yakni untuk meningkatkan efisiensi, kualitas dan pemerataan pendidikan. Selain itu juga komite sekolah mempertimbangkan program-program yang akan dijalankan di sekolah yakni dengan cara mengadakan pertemuan atau rapat dengan masyarakat dan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, bahwa komite sekolah terlibat dalam perencanaan RPS dan RAPBS sekolah. Namun penetapan kriteria pendidik, tenaga

kependidikan, dan ketersediaan fasilitas pembelajaran di sekolah sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah.

Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Pendorong

Terlaksananya kegiatan di sekolah berkat adanya dukungan dari komite sekolah, masyarakat dan masyarakat sekolah. Menurut Purwanto (2020), mendukung adalah kesediaan atau kecenderungan seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu, apabila kelompok tersebut mendapat rangsangan. Sikap pendukung dapat terjadi pada situasi tertentu, orang, kelompok, nilai-nilai yang terjadi di sekitar manusia.

Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Pengendali

Menurut Afram (2021), pengendalian adalah penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Tujuan pengendalian itu sendiri adalah untuk pengontrol semua program yang dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disepakai sebelumnya. Sebagai pengendali, komite sekolah selalu mengawasi misalnya ada tambahan jam belajar untuk mempersiapkan ujian, hal ini berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh responden. Namun ada juga informasi responden bahwa pengendalian hanya sebatas anggaran. Dengan demikian bahwa komite sekolah kurang berperan dalam proses pembelajaran di sekolah, seharusnya ini menjadi perhatian masyarakat dan sekolah, jangan sampai keberadaan komite sekolah di sekolah-sekolah dalam naungan YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi hanya tinggal nama saja tanpa ada kontribusinya dalam memantau proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Jadi bagaimana sekolah dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran komite sekolah tersebut, sebab komite sekolah adalah representasi dari masyarakat yang keberadaannya sangat berpengaruh di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, bahwa komite sekolah kurang melakukan pengendalian terhadap kebijakan/program/penyelenggaraan dan keluaran pendidikan jarang dilakukan karena mereka tidak memiliki SDM untuk melakukan pengendalian.

Peran Komite Sekolah sebagai Lembaga Penghubung

Komite sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan seluruh roda kehidupan sekolah, dengan mengkoordinasikan, menggerakkan, dan mendayagunakan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Komite sekolah merupakan faktor utama dalam mewujudkan visi, misi, strategi, dan tujuan sekolah secara utuh dan menyeluruh.

Menurut Mulyasa (2019), makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin besar rasa memiliki, makin besar pula tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula tingkat dedikasi. Dari penjelasan tersebut komite sekolah dituntut untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk menjalin kerja sama di sekolah guna menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa komite sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, serta membantu sekolah mensosialisasikan kebijakan sekolah. Namun dalam kapasitas sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada sekolah jarang dilakukan. Berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah teridentifikasi perlu diperhatikan, sehingga kegagalan implementasi kebijakan dapat dieliminir. Sesuai dengan pernyataan Azhara (2022) yang mengingatkan bahwa proses implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama, terutama pada berbagai faktor penghambat yang muncul dalam proses implementasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diberikan yaitu: Peran komite sekolah di lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala cabang Masohi dalam mengimplementasikan MBS sebagai Advisory agency (lembaga penasehat) berada pada skala prioritas cukup baik (60%), Supporting agency

(lembaga pendorong) berada pada skala prioritas baik (70%), Controlling agency (lembaga pengendali) berada pada skala prioritas cukup baik (45,71%), dan Mediator agency (lembaga penghubung) berada pada skala prioritas baik (73,3%). Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi komite sekolah di lingkup YPPK Dr. J. B. Sitanala Cabang Masohi dalam mengimplementasikan MBS, yaitu: Faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat, kerjasama yang baik antara warga sekolah dan komite sekolah, peran serta orang tua siswa dalam pengelolaan sekolah, serta dukungan pemerintah. Faktor penghambat meliputi kualitas sumberdaya manusia komite sekolah, pemahaman terhadap peran komite sekolah yang tidak benar, persepsi masyarakat tentang pendidikan gratis masih keliru, distribusi tenaga pendidik oleh Pemerintah, serta latar belakang sosial-ekonomi orang tua siswa.

REFERENSI

- Mbuik, H. B. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SD. *Indonesian Journal of Primary Education*, 3(2), 28–37. <https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i2.22100>
- Nuzula, W. F. (2022). Peran Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 15–21.
- Setiawan, M. R., Sudrajat, A., & Tedjawiani, I. (2022). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Mutu Sekolah (Studi Deskriptif tentang Peran Kepala Sekolah dalam MBS Pada SMPN 3 dan SMPN 4 Malangbong). *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(5), 1335–1346. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.553>
- Yasin, M., Aswasulasikin, Apriana, D., & Sururuddin, M. (2021). Pola Komunikasi Sekolah dengan Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(No. 3), 6305–6312. Diambil dari <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1945>